

Praktek *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang Terintegrasi pada Industri Keuangan: Sebuah Tinjauan Singkat

Dede Abdul Hasyir

Fakultas Ekonomi & Bisnis Departemen Akuntansi – Universitas Padjadjaran
(Jl. Dipati Ukur No. 35, Bandung)

Abstract

Practices of CSR (corporate social responsibility) in terms of philanthropic only may eventually cause new burden to the company. This is because of the firm needs to spend additional operating cost for executing these programs. Somehow, this practice implicates that CSR has nothing to do with the (core) business of the company. CSR programs are deployed along with other corporate's programs and have no implication to other programs at all. Recently, many businesses shift their CSR orientation and try to integrate the CSR with their business themselves.

The next question is how would the company align the CSR with the operation? Can all of CSR programs be hand in hand with the core business? The answer is that not all of CSR initiatives can be integrated with it. CSR programs with philanthropic measure can still be planned and implemented with certain portion from all of CSR budget. This idea is also applicable for finance industry. For example banking, this sector possesses an authority on fund distribution. Aligning CSR values on its core business would mean taking responsible business consideration into credit assessment of debtors. With the "equator principles" implementation, integration of CSR on operation of finance industry is not too good to be true.

Keywords: Corporate Social Responsibility, Integrated Corporate Social Responsibility, and Finance Industry

Pendahuluan

Tren CSR telah menjadi bahasa bisnis atau bahasa pemasaran dalam beberapa tahun terakhir. Teach (2005), wartawan *CFO Magazine*, mencatat bahwa kata 'CSR' pernah mencapai 4.680.000 *hits* pada situs mesin pencari *google*, melebihi kata-kata populer lainnya seperti *shareholder's value* yang pernah mencapai 2.340.000 *hits*. Di Manchester, telah berdiri sekolah CSR pertama di dunia yaitu *CSR Academy* untuk mendorong kompetensi berbasis CSR. *Majalah Mix* (2006) menyebutkan bahwa praktek CSR sangat populer di Indonesia dalam satu dekade terakhir sejak tahun 1995.

Pemerintah pun merasa perlu untuk menegaskan praktek CSR dalam undang-undang karena tuntutan praktek ini dipandang tidak bisa berjalan secara sukarela. Undang-undang perseroan terbatas yang terbaru telah mewajibkan industri yang berhubungan dengan penggunaan sumberdaya alam untuk melaksanakan CSR, seperti industri ekstraktif (pada Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah dioperasionalkan dalam PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas).

Sebagian pihak memahami implementasi CSR sebagai tindakan filantropis perusahaan kepada para pemangku kepentingannya (*stakeholders*), baik internal maupun eksternal, diluar fungsi utamanya sebagai pelaku bisnis yang beroperasi untuk memupuk keuntungan (sebagai perbandingan, penentang CSR seperti ekonom Milton Friedman (1970) pernah menyatakan bahwa *the business of business is business*, artinya tanggung jawab pebisnis adalah melakukan bisnis itu sendiri).

Praktek CSR bernuansa filantropis ini dijalankan secara terpisah dengan kegiatan perusahaan. Praktek CSR model ini menyebabkan adanya “sekularisme” antara praktek CSR dengan kegiatan bisnis perusahaan karena praktek CSR hanya menimbulkan beban baru bagi perusahaan dan tidak berhubungan dengan *nature* bisnis perusahaan. Implementasi CSR seperti ini merupakan suatu kekeliruan karena hanya akan menciptakan ketergantungan masyarakat dan membebani perusahaan dalam jangka panjang. Untuk menghindari hal ini, CSR perlu diintegrasikan kedalam nilai-nilai dan aktivitas perusahaan, dengan orientasi pada upaya untuk menumbuhkan kemandirian masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup.

Jika hal-hal ini tercapa, maka kemampuan ekonomis masyarakat akan menguat dan keberlangsungan kehidupan dapat dipertahankan karena diperkuat pula oleh daya dukung lingkungan hidup. Selain bermanfaat bagi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, dampak positif dari seluruh efek domino ini akan kembali ke perusahaan dalam jangka panjang dalam bentuk peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat (Kolk, 2004).

Kajian Teoritis

Integrasi Praktek CSR

Pada dasarnya, praktek CSR ditujukan untuk meminimalisir dampak sosial perusahaan yang bersifat negatif. Dampak negatif operasi perusahaan yang dimaksud seperti kerugian ekonomi yang dialami masyarakat di sekitar perusahaan, perlakuan buruk terhadap tenaga kerja, kerugian konsumen atas produk yang tidak sesuai standar, masalah polusi, atau menurunnya kualitas lingkungan hidup secara umum. Praktek CSR dijalankan sebagai kompensasi atas timbulnya dampak-dampak negatif tersebut. Sebagai contoh, praktek pengembangan masyarakat (*community development*) dilakukan perusahaan pertambangan untuk mereduksi kesenjangan sosial antara perusahaan dan masyarakat sekitar.

Manfaat praktek CSR akan kembali ke perusahaan dalam bentuk *social license to operate*. Kinerja CSR pun dapat diukur (seperti kata ahli manajemen yang juga penentang CSR, Peter F. Drucker: *if you can't measure it then you can't manage it*), karena praktek CSR pada dasarnya mengurangi porsi keuntungan pemilik perusahaan. Dengan demikian, wajar saja jika praktek ini diukur untung-ruginya agar tidak sampai merugikan pemilik perusahaan sebagai *stakeholder* utama.

Ketika CSR dikaitkan dengan besaran dampak sosial perusahaan, pertanyaan lain mungkin akan muncul. Apakah CSR hanya menjadi kewajiban perusahaan-perusahaan yang memiliki dampak sosial yang tinggi saja? Jawabannya tidak. CSR seyogyanya dijalankan oleh semua industri sesuai bisnis intinya. Bila tidak, efektivitas CSR dalam skala yang luas akan rendah dan dapat terjebak sebatas pada tindakan filantropis atau aktivitas kosmetik saja serta dapat merugikan pihak yang menjadi *single fighter* dalam praktek tersebut.

CSR yang dilakukan secara sepihak dipandang kurang efektif karena tidak menghasilkan sinergi CSR. Bila dicermati, keterkaitan operasional antara perusahaan satu dengan yang lainnya dapat berupa hubungan sekuensial penyerahan output dan penerimaan input sehingga membentuk suatu rantai pasokan (*supply chain*). CSR yang dilakukan masing-masing industri, meski hanya pada tingkatan kebijakan dan tidak berupa praktek CSR yang eksplisit, akan membentuk rantai nilai CSR (*value chain of CSR*). Sebagai contoh, CSR industri otomotif secara pribadi adalah menghasilkan kendaraan ramah lingkungan, sedangkan kontribusinya pada rantai nilai CSR adalah menerapkan kebijakan pengadaan input yang diproduksi secara ramah lingkungan pula. Integrasi CSR dengan kegiatan bisnis sebetulnya bertujuan untuk memudahkan pengelolaan CSR sendiri sehingga CSR tidak menjadi pekerjaan baru perusahaan. Setiap industri tidak perlu melakukan semua bentuk CSR yang sekiranya dapat membebani perusahaan, namun cukup melakukan satu atau beberapa jenis CSR yang relevan dengan kegiatan bisnisnya sehingga tidak melakukannya secara setengah-setengah. Fokus dan bahkan spesialisasi CSR ini akan menjadi nafas bisnis yang dapat dilakukan perusahaan apapun. Target akhirnya adalah adanya praktek CSR secara agregat dari seluruh lini industri guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan yang menjadi *mainstream* CSR di dunia saat ini.

Komitmen CSR dan kepedulian lingkungan harus dikaitkan langsung dengan kegiatan operasi. Bagi perusahaan-perusahaan ekstraktif, manajemen lingkungan hidup harus dimulai sebelum operasi melalui AMDAL, pada saat operasi dengan meminimalisir potensi dampak sosial dan lingkungan yang mungkin terjadi, serta pasca operasi dengan melakukan konservasi yang maksimal. Perusahaan manufaktur lainnya juga harus memperhatikan dampak lingkungannya dengan memperhatikan efisiensi penggunaan energi dan air, mengontrol kadar limbah cair dan padat, serta menurunkan emisi gas-gas rumah kaca, gas varian NO_x dan SO_x, dan gas perusak lapisan ozon.

Perusahaan non-manufaktur seperti industri keuangan juga dapat berkontribusi terhadap pencegahan bencana alam dan pencapaian pembangunan berkelanjutan. The Equator Principles yang telah diadopsi oleh sejumlah perbankan dunia dapat dijadikan acuan untuk mengukur dampak sosial dan lingkungan calon debitur atau proyek yang akan didanai. Dengan penilaian ini, risiko kerugian sosial dan kerusakan lingkungan setidaknya dapat dicegah.

Kontrol lainnya datang dari kalangan investor. Di luar negeri, para investor mengikuti skema *Socially Responsible Investment* yang mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dalam analisis investasinya. Bahkan otoritas pasar modal mereka telah mendorong pembangunan berkelanjutan melalui pengukuran kinerja keberlanjutan para emitenya, seperti *Dow Jones Sustainability Index* dan *FTSE4Good*.

CSR dan kepedulian lingkungan juga harus dijalankan secara menyeluruh di sepanjang rantai pasokan (*supply chain*). Sebagai contoh, grup penerbit Time Inc. menerapkan *sustainable paper purchasing policy* yang mengharuskan pemasok untuk menghasilkan kertas yang ramah lingkungan. Hal ini juga memaksa produsen kertas

untuk mendapatkan kayu gelondongan dari pemegang HPH yang memiliki *Certified Sustainable Forestry*.

Orientasi integrasi ini mengarahkan CSR pada upaya untuk meraih keberlanjutan (*sustainability*). Perubahan orientasi ini terjadi setelah konsep pembangunan berkelanjutan menjadi arus utama berpikir dalam melaksanakan pembangunan perekonomian. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya (WBCSD, 2001).

Pemikiran ini merupakan kritik atas paradigma pembangunan yang hanya berorientasi pada faktor ekonomi semata. Oleh karena itu, bila perusahaan hanya mengorientasikan CSR pada aspek sosial saja (seperti aktivitas filantropis tadi), maka perusahaan sebetulnya tengah mengulangi kesalahan yang sama, seperti dilakukan oleh mereka yang hanya menekankan aspek ekonomi sebagai aspek terpenting. Penonjolan pada aspek sosial saja merupakan hal yang ditentang oleh ide awal CSR yang berorientasi pada keseimbangan seluruh aspek.

Implementasi CSR pada Industri Keuangan

Dunia perbankan atau lembaga keuangan pada umumnya dapat saja melakukan CSR dalam bentuk tindakan filantropis atau melalui pendirian yayasan CSR. Bentuk CSR seperti ini tidak salah namun bila dikaitkan dengan peranannya sebagai salah satu *lord of the money*, praktek ini menjadi kurang relevan dan strategis. Integrasi CSR dengan bisnis inti perbankan dapat diwujudkan dengan penyaluran dana yang menyertakan pertimbangan potensi kemaslahatan sosial dan lingkungan di masa depan.

The equator principles merupakan prinsip pendanaan dan manajemen risiko proyek yang mendorong (atau setidaknya tidak mengganggu) kemakmuran ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, dan keadilan sosial. Prinsip-prinsip ini terutama diterapkan pada jenis pendanaan proyek-proyek yang besar, kompleks, dan mahal seperti penghasil daya, pertambangan, infrastruktur transportasi, dan pengelolaan wilayah.

Meskipun prinsip-prinsip ini belum diadopsi perbankan Indonesia, hal ini menjadi penting karena sektor perbankan negara-negara berkembang begitu kompleks dan rentan terhadap risiko finansial dan non finansial, termasuk faktor sosial dan lingkungan, seiring peningkatan kompetisi di industri ini. Upaya ini dapat melindungi portofolio aset, meningkatkan kualitas aktiva produktif, menurunkan risiko kredit macet (*non performing loans*), serta meningkatkan stabilitas keuangan dan reputasi perbankan. ACLEDA adalah lembaga keuangan di Kamboja yang berhasil menjalankan skema *sustainable microfinance*. Sedangkan sekitar 80% kredit investasi atau pendanaan proyek di dunia telah didasari prinsip-prinsip ini.

Gambaran umum dari mekanisme kredit dengan rujukan prinsip-prinsip ini adalah sebagai berikut:

- Bank melakukan *screening* tingkat risiko sosial dan lingkungan dan menetapkan suatu tingkat risiko.
- Debitur melengkapi *Environmental Assessment* yang dipersyaratkan.
- Debitur menyusun rencana tindakan yang mendeskripsikan dan memprioritaskan tindakan-tindakan untuk mengukur mitigasi (manajemen dampak) atau tindakan-tindakan korektifnya, dan memonitor pengukuran tersebut.
- Debitur mengungkapkan dampak-dampak dan mengkonsultasikan dengan pihak-pihak yang terkena dampak tersebut.

- Debitur menandatangani perjanjian untuk mematuhi rencana-rencana tindakannya.
- Melalui bantuan pihak independen, perbankan melakukan review atas kepatuhan debitur dan melakukan pelaporan secara berkala sepanjang masa pendanaan.

Sedangkan beberapa contoh produk keuangan dan mekanisme pendanaan yang mendukung keberlanjutan sosial dan lingkungan adalah:

- Pinjaman dengan fokus keberlanjutan, yang mendukung energi berkelanjutan, efisiensi energi, konservasi keanekaragaman hayati atau pendanaan *sustainable supply chain management*;
- Sewa-guna usaha (*leasing*) dengan fokus keberlanjutan, untuk proyek-proyek pengadaan peralatan efisien energi atau untuk energi yang dapat diperbaharui seperti energi surya atau *micro hydro turbines*;
- *Carbon Finance*, pendanaan proyek-proyek pengganti energi fosil atau proyek-proyek beremisi gas rumah kaca rendah;
- Asuransi kewajiban lingkungan/sosial, produk asuransi untuk meng-*cover* kewajiban/kerusakan sosial dan lingkungan tertentu.

Sedangkan standar penilaian kinerja debitur dalam prinsip-prinsip ekuator sebagaimana ditetapkan oleh International Finance Corporation (IFC) terdiri atas: penilaian sosial dan lingkungan dan sistem manajemen; kebijakan tenaga kerja dan lingkungan kerja; pencegahan dan penanggulangan polusi; kesehatan, keselamatan, dan keamanan masyarakat; kebijakan dalam akuisisi tanah dan penanggulangan masalah yang timbul dalam hal itu; konservasi keaneka-ragaman hayati dan manajemen SDA yang berkelanjutan; perlindungan hak-hak warga pribumi; dan perlindungan kebudayaan. Melalui cara ini, perbankan dapat memfokuskan pendanaan pada perusahaan-perusahaan atau proyek-proyek yang memiliki kinerja keuangan, sosial, dan lingkungan yang tinggi.

Kesimpulan

Semua pihak rasanya sepakat bahwa makna CSR yang sesungguhnya adalah tindakan-tindakan murni bernuansa sosial yang tidak pantas diukur untung ruginya. Akan tetapi, keberatan atas tuntutan praktek ini harus dapat dijawab dengan suatu solusi yang berimbang bagi seluruh pihak. Integrasi CSR dengan kegiatan bisnis, di satu sisi diharapkan dapat memudahkan pelaku bisnis untuk menjawab tuntutan CSR. Sedangkan di sisi lain, diharapkan tetap dapat memberikan ruang yang cukup bagi ekspektasi publik tentang adanya tanggung jawab sosial.

CSR dalam konteks industri keuangan lebih bersifat preventif. *The equator principles* merupakan internalisasi faktor risiko sosial dan lingkungan kedalam analisis pendanaan suatu kegiatan/proyek. Dampak sosial dan lingkungan para debitur yang bersifat negatif memang bukan kesalahan perbankan, namun perbankan ikut andil atas efek domino tersebut jika faktor itu tidak diperhatikan sejak dini. Praktek CSR ini sepertinya tidak populis bagi tujuan pencitraan perbankan. Namun tidak demikian bila orientasi CSR seluruh pihak sudah mengarah pada keberlanjutan. Dengan perhitungan *economies of scale* dari proyek yang didanai, pertimbangan untung-rugi dari penerapan prinsip ini dapat tertutupi oleh manfaat jangka panjangnya. Perbankan juga dapat mempublikasikan hal ini guna mengedukasi seluruh pihak tentang makna sesungguhnya

dari suatu *bank credibility* (seperti terungkap dalam survey IFC-World Bank, 2005, sebagai salah satu keuntungan dari pengadopsian prinsip ini).

Daftar Pustaka

- Friedman, M. 1970. A Friedman doctrine: The Social Responsibility of Business is to Increase Its Profit. *New York Times Magazine*. 13 September 1970:33.
- International Finance Corporation. 2005. *Banking on Sustainability*. World Bank Group Publication.
- Kolk, Ans. 2004. A Decade of Sustainability Reporting: Developments and Significance. *International Journal of Environment and Sustainable Development*. Vol. 3, No. 1, pp.51-64.
- Majalah Mix. Oktober 2006. CSR untuk Kemasalahatan Perusahaan Juga; Bagaimana Seharusnya CSR; dan Indonesia's Leading CSR Companies. ditulis oleh Tim Redaksi, hlm. 14-26, © *Majalah Mix* 2006 (Kelompok Majalah SWA).
- Teach, Edward. 2005. The CSR Movement is Picking Up, Sholud You Worry About It? *CFO Magazine*. © CFO Publishing Corporation, 2007.
- WBCSD (World Business Council for Sustainable Development). 2001. Corporate Social Responsibility. *research publications of WBCSD*. on www.wbcsd.org, the Switzerland.